

Terorisme dan Deradikalisasi Agama di ASEAN

Oleh Dr. Asep Salahudin, MA

PSA IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya

Visi Masyarakat ASEAN 2025 adalah untuk mengkonsolidasikan, membangun, dan memperdalam proses integrasi untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang berbasis aturan, berorientasi masyarakat, dan berpusat pada masyarakat, di mana Masyarakat ASEAN akan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama, dipandu oleh tujuan dan prinsip Piagam ASEAN

Salah satu pilarnya mencakup persoalan Sosial Budaya ASEAN dengan lima karakter utamanya yang meliputi: (1) *Engages and benefits the people*; (2) *Inclusive*; (3) *Sustainable*; (4) *Resilient* dan (5) *Dynamic*. Diperkuat dengan visi politik dan keamanan ASEAN 2025, yakni:

1. Masyarakat yang semakin bersatu, inklusif, dan memiliki ketahanan.
2. Hidup dengan aman dan harmonis, di lingkungan yang damai, saling toleransi, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental, nilai-nilai, dan norma ASEAN.
3. Kawasan yang kohesif, responsif, dan dapat menghadapi tantangan keamanan di kawasan, serta memegang peran utama dalam perkembangan arsitektur keamanan di kawasan.
4. Hubungan yang semakin dalam dengan mitra wicara dan external parties, serta secara kolektif berkontribusi kepada upaya pemeliharaan kedamaian, keamanan, dan stabilitas dunia.

Perhatian terhadap persoalan sosial budaya ini penting dikarenakan ASEAN melambungkan tentang sekumpulan negara dengan keragaman etnik, agama, budaya yang apabila tidak terkelola secara baik bisa menjadi awal bagi meletusnya konflik dan tidak menutup kemungkinan dapat menjalar ke mana-mana. Sebaliknya apabila dikelola baik bisa menjadi modal sosial dan modal budaya untuk membangun ASEAN yang kokoh dengan halaman muka keragaman budaya dan agama yang menakjubkan.

Dicky Sofjan, Principal Investigator pada Konferensi Internasional dalam konferensi tentang “Agama, Kebijakan Publik, dan Transformasi Sosial di Asia Tenggara”, Kamis (Humas UGM, 20/3) di The Phoenix Hotel, Yogyakarta yang diadakan oleh *Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)*, yang beranggotakan UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan UKDW menyatakan, “Sebagai kawasan yang pluralistik, multietnik, dan multiagama, Asia Tenggara merupakan kawah candradimuka dalam pengelolaan keberagaman agama dan multikulturalisme. Di satu sisi, agama bisa menjadi modal sosial bagi upaya mewujudkan transformasi sosial yang positif di kawasan ini. Namun di sisi lain, semakin kuatnya pengaruh agama di ranah publik ternyata menghadirkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini pada persoalan pelik keberagaman agama dan multikulturalisme. Alih-alih terciptanya transformasi sosial yang positif, situasi ini

malah melahirkan berbagai persoalan sosial seperti intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan konflik sosial-keagamaan.

“Dengan karakteristik yang plural dan beragam tersebut, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai pengalaman yang unik dalam mengelola keberagaman agama, yang bisa menjadi pengalaman berharga bagi negara-negara lain.” Ia menjelaskan bahwa konferensi ini bertujuan untuk memberikan *platform* bagi akumulasi pemikiran dan pengetahuan tentang pengelolaan keberagaman agama baik di tingkat nasional maupun regional. Acara menghadirkan para ahli agama di Asia Tenggara dan Amerika Serikat yang terlibat dalam riset kolaboratif Sembilan Negara tentang Agama, Kebijakan Publik, dan Transformasi Sosial di Asia Tenggara. Sembilan negara Asia Tenggara tersebut, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan ditambah Amerika Serikat.. Semakin pentingnya isu-isu agama dalam penentuan kebijakan publik dan transformasi sosial di negara-negara Asia Tenggara, pada gilirannya akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara-negara lain di luar kawasan, khususnya dengan Amerika Serikat” paparnya.

Theodore Lyng, Penasihat Politik Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, masih dalam acara sama, mengatakan bahwa nilai-nilai agama bisa masuk ke ranah kebijakan publik dan relasi antarbangsa tanpa harus melahirkan dominasi dan apalagi kekerasan. ”Para peneliti memaparkan hasil penelitiannya selama setahun tentang pengelolaan keberagaman agama di negaranya masing-masing, seperti isu pluralisme agama dan hubungannya dengan pendidikan agama dan multikulturalisme, kesenjangan mayoritas-minoritas, politik dominasi dan isu-isu terkait lainnya”

Di sinilah masyarakat ASEAN dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan dinamis berdasarkan pendekatan yang berfokus pada masyarakat (*people-centered approach*). Masyarakat Sosial Budaya ASEAN mencakup kerja sama yang luas dan multisektor. Sebagai satu masyarakat sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat

Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup

Isu Terorisme

Isu-isu pokok yang harus mendapatkan prioritas seperti dalam AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) meliputi : (1) *terrorism*, (2) *illicit drugs trafficking*, (3) *trafficking in persons*, (4) *money laundering*, (5) *arms*

smuggling, (6) sea piracy, (7) international economic crime, (8) cybercrime, (9) people smuggling, dan (10) illicit trafficking of wildlife and timber.

Dari sepuluh isu itu, satu di antaranya yang akan menjadi pembahasan paper ini adalah terorisme. Dalam naskah ASEAN disebutkan upaya untuk menangkis isu terorisme dilakukan sejumlah mekanisme, antara lain:

1. ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan ASEAN Regional Forum (ARF).
2. Indonesia menginisiasi penyusunan ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) yang ditandatangani seluruh negara ASEAN pada 2009. ACCT memuat aspek soft power, pendekatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi dalam penanganannya terhadap isu terorisme.
3. Indonesia sebagai lead shepherd isu terorisme di SOMTC memprakarsai pemutakhiran ACPoA on CT (2009) di tingkat SOMTC Working Group on CT.
4. Indonesia menyelenggarakan pertemuan International Meeting on Counter-Terrorism (IMCT) bersama negara-negara terdampak terorisme di kawasan untuk membahas isu cross-border movement of terrorism pada Agustus 2016. Pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan di sejumlah mekanisme, antara lain: ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus), dan ASEAN Regional Forum (ARF).

Lutfi Rauf (2016), menyebutkan bahwa isu-isu itu tidak bersifat lokal tapi menjadi bersentuhan dengan arus global sehingga penanganannya pun tidak boleh parsial tapi harus holistik dan komprehensif. Petanya adalah: 1. Kondisi geopolitik global diwarnai oleh situasi kekuatan multipolar dengan aktor internasional yang semakin beragam; 2. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi mendorong arus globalisasi yang dimanfaatkan kepentingan ekonomi, politik dan sosial oleh negara/pihak yang menguasainya; 3. Meningkatnya pergerakan barang, jasa, dan manusia apabila tidak diantisipasi memicu peningkatan tantangan global serta ancaman keamanan tradisional yaitu kejahatan transnasional.

Guna merespon tantangan global tersebut maka pemerintah Indonesia telah menetapkan Nawacita atau 9 agenda prioritas yang dirumuskan dalam 4 prioritas politik luar negeri yaitu:

1. Menjaga kedaulatan NKRI;
2. Melindungi WNI/BHI di luar negeri;
3. Meningkatkan diplomasi ekonomi;
4. Meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional.

Pemahaman Agama yang keliru

Terorisme sangat berkaitan dengan banyak hal termasuk pemahaman agama yang keliru. Abad 21 dengan mencuatnya ISIS di Timur Tengah dan pengaruhnya

sudah mulai masuk ke kawasan ASEAN, ternyata tindakan primitif itu alih-alih surut malah menampakkan gejala kebangkitan dengan segala variasinya.¹ Etika global (*global ethic*) seperti dalam Hans Kung yang digadang-gadang menjadi panduan kaum agamawan untuk membangun persekutuan inklusif dan menginjeksikan kesadaran perenial bahwa bumi ini milik kita semua dan harus dirawat secara bersama nampaknya kian lambat terdengar.²

Modernisme yang telah mencapai kedudukan tinggi dan rasionalisme mendapatkan daulat utama yang semestinya kian menyurutkan kekerasan bermotifkan agama, kenyataannya tidak otomatis seperti itu. Daya cengkram agama masih kuat dan tragisnya pemaknaan agama dan budaya yang dikedepankan sangat menghinakan nalar dan mendangkalkan akal sehat. Agama ditarik dalam tafsir skolastik dan fantasi kebesaran masa silam dengan pensikapannya yang serba hitam putih, bipolar dan eksklusif.

Tentu saja ada banyak faktor yang menjadi penyebab agama hadir dengan wajah mengerikan seperti itu. Dalam *When Religion Becomes Evil*, Charles Kimball menyebut lima faktor yang dapat mengubah agama menjadi bencana: (1) pendakuan kebenaran mutlak; (2) ketundukan buta terhadap pimpinan agama seperti Peoples Temple-nya Jim Jones di Guyana, Aum Shinrikyo di bawah Asahara Shoko di Jepang, dan gerakan David Koresh di Texas; (3) gandrung terhadap zaman ideal dengan menjadikan masa lalu sebagai contoh dari perjuangan keagamaannya seperti terjadi pada rejim Taliban di Afganistan, ide negara Yahudi Rabi Meï Kahane, dan kelompok keras Kristen Amerika Pat Robertson; (4) menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan, dan; (5) mengartikan perang suci secara salah kaprah dan menyesatkan.

Wajah paradoksal

Fenomena ini semakin meneguhkan makna kepada kita betapa agama acapkali tampil ke permukaan dengan wajah paradoksal. Di satu sisi secara teologis mengajarkan damai kasih, namun di sisi lain fakta sosiologis tidak sedikit kekerasan bahkan pembunuhan secara massal, terstruktur dan sistemik dilakukan kaum agamawan atas nama agama. Agama memompakan motivasi ihwal hidup yang tertib, saling menghargai, dan menginjeksikan motivasi tentang keharusan mengembangkan ketajaman nalar dan kehalusan pekerti untuk membangun peradaban luhur.

¹ ISIS (*Islamic State in Iraq and al-Sham* atau *Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham*) adalah sebuah gerakan puritan yang mencanangkan negara Islam raya mencakup Irak dan Sham. *Al-Sham* dalam konteks Arab klasik maknanya merujuk tidak hanya seputar wilayah Suriah namun juga mencakup Israel, Yordania, Lebanon dan Palestina termasuk Turki bagian tenggara. Seluruh organisasi keras para pendahulunya “berkoalisi” dengan ISIS. Sebut saja Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI) Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taifa al-Mansoura, serta sejumlah etnik yang tersebar di Irak yang dahulu bisa “dikendalikan” (dan dimanfaatkan) Saddam Husein untuk kepentingan politiknya. Pada 9 April 2013 di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Bagdadi (pengganti Abu Umar al-Bagdadi yang telah meninggal) Negara Islam Irak dan Syam dideklarasikan. Dalam pengakuannya sepanjang 400.000 km² yang artinya lebih luas dari negara Lebanon, Yaman, Bahrain, Qatar, dan Emirat Arab telah berada di bawah kendali kekuasaannya

² Lihat Hans Kung, *Global Responsibility. In Search of a New World Ethic* (New York, 1980)

Agama menanamkan haluan tentang mencari dan mengisi hidup dengan penuh ketenangan. Ketenangan yang diacukan ke gerak dialektis transendental ketuhanan yang kemudian implikasinya merembes dalam sejarah pengalaman keseharian. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan bumi, serupa dengan apa yang sampaikan salah seorang Nabi Tuhan, Muhammad SAW, “*Siapa yang dapat berdamai dengan langit, maka dia pasti bisa berdamai dengan bumi.*”

Agama diturunkan selalu sebagai counter kultur terhadap budaya manusia yang telah tersekap hedonisme-konsumerisme, terkerangkeng oleh pola hidup dan keyakinan yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Ia mengajak manusia melalui risalah yang disampaikan para nabinya untuk merayakan hidup yang bertopang pada kekuatan akal budi, kehangatan spiritual, kesantunan dalam membangun relasi kemanusiaan yang dalam konteks Islam dirumuskan dengan ungkapan *rahmatan lil alamin*.

Namun, di sisi lain, tragisnya agama sering kali menjadi pemantik munculnya berbagai bentuk kekerasan. Agama yang ditafsirkan secara serampangan menjadi pembenaran ilahiah untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Agama dibajak kepentingan politik dan sekelompok laskar untuk tujuan yang tidak jelas arahnya, kecuali sekadar nafsu meneguhkan hasrat primitif kejemawaan akan ‘keakuan’ dan politik sempit perkauman. Itulah yang kita sebut dengan kekerasan simbolis.

Orang melakukan kekerasan bukan hanya merasa tidak bersalah, bahkan beranggapan bahwa kekerasan itu menjadi pintu masuk meraih pahala Tuhan. Surga dalam keyakinannya dibarter dengan sikap heroisme memberangus hal ihwal yang dianggap berseberangan dengan pemahamannya, bertentangan dengan haluan agamanya.

Tuhan pun dihadirkan tidak lagi sebagai zat yang penyayang, tapi lebih sebagai sosok pendendam, penghukum, dan pemilik azab. Seolah Tuhan dengan teks-teks wahyu-Nya merekomendasikan kekerasan. Kekerasan menjadi seakan kehendak Tuhan, seolah sah kalau sudah mengatasnamakan agama.

Seperti ditulis Haryatmoko (2010), tindakan kekerasan, salah satunya, dapat dilihat sebagai proses mental, yaitu gerak perubahan mulai cara melihat ‘yang lain’, lalu menstigmatisasi, merendahkan, menghancurkan, dan akhirnya membunuh. Suatu kelompok cenderung mempertahankan kan kemurnian identitas mereka melawan du nia yang tidak murni penyebab dekadensi moral. Pembenaran simbolis agama meneguhkan tekad, memperta jam permusuhan, dan memistis kan motif men jadi perjuangan membela iman dan kebenaran.

Ricoeur (Haryatmoko, 2010) mengurai alasan mengapa agama mempertahankan motivasi. Pertama, agama memberikan identitas karena akta pendirian suatu kelompok diaku alisasikan kembali dengan representasi diri. Kedua, agama menumbuhkan keya kinan bahwa orang berada dalam kontak dengan makna terdalam hidupnya. Ketiga, acuan ke tujuan terakhir memberi pembenaran dan mendasari sikap kritis terhadap tatanan yang ditolaknya.

Tentu saja untuk keluar dari sekapan agama palsu yang dapat menjadi ancaman bagi negara dan kemanusiaan seperti itu tidak lain dengan cara kembali ke

rute agama yang otentik, menanggalkan pemaknaan keberagamaan yang harifah, fundamentalistik, penuh kebencian dan skripturalis beralih ke arah iman yang hidup dan transformatif. Kembali kepada risalah kesadaran utama bahwa kelahiran agama selalu sebagai interupsi dan kritik ideologis terhadap tatanan banal dan sistem yang memuja kekerasan, hedonisme, dan hidup yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keluhuran budi.

Sejatinya suara kenabian adalah suara kasih sayang. Seperti dapat disimak dalam Konfusianisme, Buddhisme, Yahudi, Kristen, Islam, dan Yunani kuno. Ibnu Masud meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang berbicara kepada Muhammad Saw dengan badan gemetar karena keagungan beliau. Muhammad SAW merespon, "Wahai saudaraku tenanglah, aku bukan seorang raja. *"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."* (QS. 9 : 128). Dalam QS. 3 159. *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka...."*

Isa al-Masih dengan penuh kelembutan menyerukan dalam Matius 5: (39), "Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu...Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

Seperti dikutip Karen Armstrong dalam *Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih* yang hendak menumbuhkan nilai kasih sayang sebagai lokus utama dalam agama-agama ditulis "Kita harus peduli kepada sesama manusia, mencintai semua kelompok, bahkan belajar mencintai musuh kita." Bahwa "Kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi." (*Dhammapada 5*). Dan, "Samana Gotama tidak merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh dan tidak mau merusak tumbuh-tumbuhan. Tidak membunuh makhluk. Samana Gotama menjauhkan diri dari membunuh makhluk. Ia telah membuang alat pemukul dan pedang. Ia tidak melakukan kekerasan. Karena cinta kasih, kasih sayang dan kebaikan hatinya kepada semua makhluk." (*Brahmajala Sutta*)

Konteks Indonesia

Harus diakui bahwa pascareformasi radikalisme keagamaan mengalami eskalasi. Kondisi negara yang lemah dijadikan ruang kaum militan untuk mengartikulasikan politik-keagamaannya. Berbeda dengan zaman orde baru di mana negara bisa bertindak keras terhadap aliran "kanan" yang dianggap dapat mengancam NKRI seperti operasi pemberangusan Komando jihad, Talangsari Lampung, Peristiwa Tanjung Priok, Haur Koneng Jawa Barat dan lain sebagainya.

Masih hangat dalam pikiran kita bagaimana kaum teroris bekerjasama dengan al-Qaida dan Jamaah Islamiyah berhasil menebar teror ketakutan dengan meledakkan bom di tempat-tempat strategis. Densus 88 yang terus memburu, bukan mengecilkan nyalinya justru kian mengobarkan perlawanan bahkan mereka memandangnya telah menemukan lawan yang setimpal.

Di tengah ormas-ormas mapan semacam Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persis yang disibukkan persoalan partai politik, terjebak permainan kekuasaan praktis, kaum militan menggunakan ruang kosong yang ditinggalkan kaum moderat itu untuk menyebarkan paham eksklusifnya. “Direbutlah” masjid-masjid kemudian dijadikan basis perjuangannya, disusupkan ke pesantren-pesantren tradisional paham yang aneh.

Jangan heran seandainya yang sering terdengar dari mikropon masjid hari ini adalah khutbah penuh kebencian, fatwa yang dikeluarkan sarat caci maki dan kaum muda yang kuliah di Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi sekuler bukannya beragama dengan menjunjung tinggi daulat nalar, justru berkarib dengan literasi wahabisme, puritanisme dan serba tertutup. Menjamur halaqah-halaqah tanpa “mursyid”, pengajian-pengajian bawah tanah yang hanya sekadar mendiskusikan wacana jihad, ghazwul fikr, syariat Islam. Dan selebihnya kewajiban “iuran” darimana pun sumber dananya.

Fenomena ISIS

Bagi saya ISIS bukan hanya cermin anak haram Islam, dalam konteks keindonesiaan ISIS dan gerakan radikalisme yang sehaluan dengannya melambangkan penghinaan terhadap realitas sosial yang majemuk. Fundamentalisme seperti ditulis Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation* (1979) tak lebih adalah sekumpulan “orang-orang yang picik, dangkal dan artifisial, “anti intelektualisme” dan sejatinya bertentangan dengan elan al-Quran dan tradisionalisme Islam.

Leluhur kita telah mewariskan model keberagamaan yang moderat. Agama yang mampu beradaptasi dengan budaya lokal secara kreatif, mengembangkan keadaban, menghargai liyan, menjadikan kemajemukan sebagai pengalaman yang akan memperkaya hubungan antar umat beragama dan yang seagama sebagaimana tertera dalam kearifan Bhineka Tunggal Ika yang digali dari kitab Sutasoma Empu Tantular. Konfigurasi agama seperti ini secara ontologis sesungguhnya merupakan khitah keimanan, modus risalah kenabian: *rahmatan lil’alamin*. Jika tidak seperti ini maka yakinlah semuanya hanya politisasi dan komodifikasi agama untuk kepentingan sesat dan sesaat.

Radikalisme Politik Keagamaan

Nampaknya dalam konteks ASEAN mempercakapkan relasi agama dengan politik memiliki relevansi kuat, terutama kaitannya dengan fenomena merebaknya kemunculan gerakan dan paham keagamaan yang sarat agenda politik itu.

Tentu tidak ada masalah ketika politik yang diusung lebih kepada peneguhan nilai-nilai kemanusiaan atau dalam konteks keindonesiaan kian memperteguh eksistensi NKRI dan Pancasila yang notabene menjadi falsafah bernegara dan “titik temu” (*kalimatun sawa*) dari keragaman kita dalam berbangsa. Pancasila yang digali dari bentangan kekayaan kearifan lokal dan spirit keagamaan yang telah tumbuh dalam palung alam penghayatan masyarakat Nusantara.

Justru menjadi masalah bersama ketika politik yang dikembangkan bertentangan dengan ideologi negara masing-masing negara ASEAN. Menjadi

masalah yang tidak boleh dianggap sepele ketika paham yang “didakwahrkannya” sarat kebencian dan negara hari ini yang kita diami dipandang secara teologis hanya “titik antara” untuk pada gilirannya dibangun format negara yang difantasi selaras dengan kerajaan Tuhan di langit yang mesti diperjuangkan lewat kekerasan.

Kekerasan simbolik

Sejarah mencatat kekerasan fisik, selalu bermula dari kekerasan simbolik. Dari pemahaman keliru yang diinjeksikan secara indoktriner. Konflik atas nama agama senantiasa berawal dari penanaman di ranah kognitif pemahaman agama yang disesuaikan dengan “target politik” eksklusif yang mengalir deras dalam aras bawah sadarnya.

Seperti pernah dibilang Jean Paul Sartre, tidak ada sebuah kekerasan mengerikan, berdampak sistemik dan berjangka panjang baik secara sosiologis atau psikologis kecuali ketika Tuhan dilibatkan dalam sebuah pagelaran sengketa itu, ketika keyakinan metafisis mengambil alih nalar logis. “Saat manusia berhasrat menjadi Tuhan”, maka saat inilah tidak saja khitah agama yang terancam namun juga kelangsungan kemanusiaan dipertaruhkan.

“Menjadi Tuhan” tentu bukan dalam artian ontologis, tapi metaforis. Ketika manusia memonopoli kebenaran, saat Allahu Akbar dimaknai bukan Tuhan yang besar tapi dirinya yang besar sehingga dengan jemawa menganggap liyan harus dimusnahkan, manakala politik berpusat pada pemberhalaan terhadap uzza tak ubahnya dalam tradisi jahiliah dahulu.

Sebangun dengan apa yang dibilang Nietzsche dalam *Thus Spoke Zarathustra* ketika dia mengapungkan tesis kematian Tuhan. Bagi saya maknanya bukan Tuhan Mahaabadi yang telah menemui ajal purbanya tapi ketika kaum beragama tersekap dalam sikap ambiguitas: mengaku bertuhan (beragama), namun tindakan politiknya mencerminkan perilaku banal yang jauh dari nilai-nilai agama, saat risalah kedamaian dikhutbahkan tapi perangnya penuh angkara.

“Tuhan mati” lebih sebagai sebuah interupsi religious paling menggetarkan bahwa sesungguhnya kaum agamawanlah yang telah “membunuhnya”. Sebuah pembunuhan yang pada kenyataannya malah seringkali dilakukan di tengah perayaan pekik ritus kesalehan individual dan penampakkan atribut keagamaan yang bersifat artifisial, tapi tidak cukup modal sosial untuk memiliki kesalehan lintas agama dan kultural, tidak punya cukup keberanian hidup berdampingan membangun kohesivitas dengan mereka yang tidak sehaluan.

“Tuhan mati” ketika liyan dianggap kafir. Dan anehnya pengkafiran (*takfir*) justru dilegitimasi ayat-ayat Tuhan sendiri yang ditafsirkan serampangan dan parsial. Ketika ayat-ayat Tuhan tidak dibawa ke medan pemahaman yang membawa pencerahan (iluminasi), membebaskan (liberasi) umat dan kemanusiaan menemukan akhlaknya yang tinggi tapi justru dikerdilkan semata untuk merebut “tanah yang dijanjikan” dalam perspektif subjektifnya sendiri.

Dalam literasi Islam, mistikus Ibnu Arabi yang menandai kebesaran Islam di Andalusia (lahir di Mursia, Andalusia, Spanyol, tahun 560 H/1165 M dan meninggal di Damaskus, Syria, tahun 638 H/1240 M) juga telah menenggarai bahwa hakikat

keberagaman itu agar tetap “hidup” harus diletakkan dalam ceruk daya cinta, dalam kekuatan kasih sayang. Ia katakan, “*Sungguh ajaib, Sebuah taman yang terkepung nyalah api/Hatiku telah sanggup menerima aneka bentuk/Ia merupakan padang rumput bagi rusa-rusa/Biara bagi para rahib-rahib Kristen, kuil anjungan berhala/Kabah tempat orang bertawaf/Batu tulis untuk taurat/Dan mushaf bagi al-Qur’an/Agamaku adalah agama cinta, yang senantiasa/kuikuti kemana pun langkahnya; itulah agama keimananku*” (Henry Corbin, *Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi*, Yogyakarta: LKiS, 2002).

Negara-negara ASEAN tak absen

Sudah barang tentu dalam konteks ini, negara-negara ASEAN tidak boleh absen dan harus memiliki kesamaan visi dan gerakan dalam melihat kenyataan yang dapat mengancam kelangsungan eksistensinya. Kepentingan bersama harus diutamakan. Dahulu Bung Karno menyatakan ketika menyampaikan pidato di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”...*Saya (Soekarno) yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan dan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama.*”

Dalam latar keindonesiaan Kementerian agama mempunyai kewajiban moral-konstitusional untuk bukan hanya mengurangi deret kekerasan berjubahkan agama (mazhab), namun juga mengantisipasi setiap gerakan keagamaan yang bertentangan dengan sendi sendi bernegara. Kementerian agama jangan hanya terjebak dalam urusan teknis rutin semacam pengelolaan dana haji, pengadaan ruang kelas, rukyat dan hisab, catatan nikah dan sebagainya tapi juga membangun falsafah visi keagamaan nusantara dan negara-negara ASEAN yang inklusif, transformatif dan politik keutamaan.

Dr. Asep Salahudin, lahir di Garut, 26 Juni 1972. Alumnus S3 Unpad, Bandung (2012), S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tulisannya tentang sosial, politik, dan kebudayaan tersebar di *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Jurnal Nasional*, *Koran Jakarta*, *Pikiran Rakyat*, *Tribun Jabar*, *Galamedia* dan di media berbahasa Sunda (*Mangle*, *Galura* dan *Cupumanik*). Esainya mendapat penghargaan dari Majalah Sunda Mangle (2009), LBSS/Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (2010), dan Juara I Rucita Aksara Universitas Padjajaran sebagai mahasiswa Pascasarjana Unpad yang paling produktif menyebarkan gagasannya di berbagai media lokal dan nasional (2013). 2016 meraih Anugerah Budaya dari Walikota Bandung.

Menulis buku *Kepemimpinan Sunda* (Paguyuban Pasundan, 2012), kontributor *Nalar Memilih Pemimpin* (Isac Book art and Culture Yogyakarta, 2014), *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Kompas, 2015). Dekan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya (2012-2016), Wakil Rektor bidang akademik IAILM (2016-2020), Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat (2017-2021). Mengajar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Seni dan Sastra (FISS) Unpas, dan Pascasarjana IAILM Suryalaya